

## Dampak Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nagekeo-Flores

Selfesina Samadara<sup>1)</sup>, Jennie S.Sir,<sup>2)</sup> Imelda M. Poeh<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Jurusan Akuntansi , Politeknik Negeri Kupang

[selfisamadara@gmail.com](mailto:selfisamadara@gmail.com), [jenniesir678@gmail.com](mailto:jenniesir678@gmail.com), [poeh\\_melda@yahoo.co.id](mailto:poeh_melda@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*This study aims to determine the Impact of implementing performance-based budgeting on the Performance Accountability of Government Agencies in the Nagekeo-Flores Regency. The implementation of this performance-based budget utilizes four variables: budget planning (X1), budget implementation (X2), budget accountability (X3), and performance evaluation (X4). The Y variable is Performance Accountability. The study uses primary data. The population in this study consists of the budget and accounting sub-sections of the Financial and Regional Asset Management Agency of Nagekeo-Flores Regency. The analysis method used in this study is multiple linear regression. Based on the hypothesis test result in this study, the influence of budget implementation, consisting of budget planning, budget implementation, and budget accountability reporting, has a positive and significant effect, and performance evaluation has a negative and significant impact on the performance accountability of Nagekeo Regency Government agencies.*

**Keywords:** Budget, Performance, Accountability

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nagekeo-Flores. Penerapan anggaran berbasis kinerja ini menggunakan empat variabel yaitu, perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), pertanggung jawaban anggaran (X3), evaluasi kinerj (X4) dan yang menjadi variable Y adalah Akuntabilitas Kinerja. Penelitian menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah sub bagian anggaran dan sub bagian akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo-Flores. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini bahwa pengaruh penerapan anggaran yang terdiri dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan, dan evaluasi kinerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

**Kata kunci:** Anggaran, Kinerja, Akuntabilitas

### 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara telah menetapkan bahwa APBD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatannya dan kegunaannya oleh masyarakat. Seiring dengan reformasi pemerintahan di Indonesia, dikeluarakan Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah, selain itu juga mengharuskan pemerintah untuk dapat memenuhi akuntabilitas tidak hanya kepada pemerintah pusat tetapi juga kepada masyarakat. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja dalam rangka pengelolaan dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang

secara khusus memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan. Dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja ini maka kinerja dari instansi pemerintah akan lebih jelas dan terukur hasil atau manfaatnya, karena anggaran berbasis kinerja menuntut kesesuaian dan kejelasan tujuan dan sasaran yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan pemerintah. Sistem penganggaran berbasis kinerja juga digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pemerintah baik dari segi pencapaian sasaran kinerja maupun keuangannya. Sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara

terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Selain itu, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memang merupakan suatu kewajiban instansi pemerintah. Terlebih saat ini, kinerja instansi pemerintah telah banyak mendapat sorotan dari masyarakat terkait dengan manfaat yang dirasakan dari pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana public. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.. Keberhasilan kinerja instansi pemerintah dapat dicerminkan dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang dapat mewujudkan keadaan tersebut salah satunya adalah apabila kegiatan APBD dilakukan dengan baik.

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo-Flores, bagaimana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Nagekeo-Flores dan bagaimana pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Nagekeo-Flores. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada penerapan anggaran berbasis kinerja, capaian kinerja, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikaitkan dengan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo-Flores. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana dampak penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Nagekeo-Flores.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menganalisa dan memperkaya pembahasan penelitian, serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini disertakan empat yang dijadikan sumber referensi, yang berhubungan dengan konsep Anggaran berbasis Kinerja. Penelitian antara lain ; 1) Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjamin Mutu

Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung (2022); 2) Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Bogor, 2019. 3). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sumatera Utara, 2022), 4) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sumatera Utara, 2022), 5) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Malang.

Kaitan riset sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah Anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah diteliti antara lain oleh Nur (2021), Herlina (2019), dan Kukuh (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun hasil penelitian Nadila (2022) menunjukkan bahwa sub variabel penerapan anggaran berbasis kinerja masih ada yang tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga hubungan antar variabel ini masih perlu diteliti karena masih ditemukannya perbedaan hasil.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penganggaran Berbasis Kinerja

Menurut Abdul Halim (2017) menyatakan bahwa penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk untuk pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggung jawaban kepada publik.

Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Sedangkan menurut Bastian (2010) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, misi dan rencana strategis organisasi. Sedangkan berdasarkan Anggarini & Puranta (2010) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai sistem penganggaran yang fokus utamanya lebih kepada pemanfaatan dana yang ada supaya dapat dipergunakan dengan optimal dan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Penganggaran Berbasis Kinerja terdiri dari :

a. Perencanaan anggaran

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka

diperlukan perencanaan pembangunan nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah.

Ketentuan mengenai di sistem perencanaan pembangunan nasional, yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No.32 dan 33 Tahun 2004.

## b. Pelaksanaan Anggrana

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran Derah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD dilaksanakan setelah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD) ditetapkan oleh pejabat penatausahaan keuangan daerah (PPKD) dengan persetujuan sekretaris daerah.

Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapanya daripada umpan balik dari pengalaman yang sebelumnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang di berikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan. (b). menyesuaikan pelaksanaan anggrana dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro. (c). memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaanya. (d). menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif sistem pelaksanaan anggrana harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggrana dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah dalam pelaksanaan anggrana serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

## c. Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan SKPD dilaksanakan secara periodic yang mencakup:

1. Laporan realisasi anggrana satuan kerja perangkat daerah(SKPD)
2. Neraca satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
3. Catatan atas laporan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah.

## d. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

## 2.2 Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

### 1. Defenisi akuntabilitas kinerja instansi

#### Pemerintah

Menurut Lembaga Adminitrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan(LAN dan BPKP 2000) akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumberdaya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik sumberdaya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan padanya.

Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks Negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang dan kekuasan hukum dan politik. Keputusan kepala LAN No.239/1X/6/8/2003 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja insansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

### 2. Siklus Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya

meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Penempatan perencanaan stratejik
- b. Pengukuran kinerja
- c. Pelaporan kinerja
- d. Pemanfaatan informasi bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan
3. Perangkat Daerah

Diperlukan pembagian tugas yang efektif dan efisien agar visi dan misi daerah dapat tercapai dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Perwujudan tersebut dilakukan oleh daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Perangkat Daerah yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan kecamatan.

### 3. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian dengan menggunakan angka yang diperoleh dari jawaban yang diberikan ke responden kemudian menggunakan teknik perhitungan statistik (Candra et al., 2021). Analisis yang dipakai dalam penelitian menggunakan teknik regresi linier berganda, yaitu teknik yang dapat digunakan menganalisis lebih dari dua variabel bebas. (Hardani et al., 2020,).

Data yang digunakan adalah data primer, yang berupa persepsi para responden terhadap variable-variabel yang digunakan. Komunikasi untuk memperoleh data dari responden dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Kusioner yang diberikan berisi sejumlah pernyataan yang akan dibagikan kepada seluruh pegawai instansi pemerintah. Setiap kuesioner yang didistribusikan kepada para responden disertai surat permohonan pengisian kuesioner. Sasaran populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di lingkup pemerintahan Kabupaten Nagekeo-Flores yang terdiri dari satu inspektorat, enam badan, delapan belas dinas, tiga belas kecamatan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi(Sugiyono, 2017).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling bertujuan dilakukan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang menjadi anggota sampel adalah kepala dinas, kepala badan, camat, sekretaris dinas, sekretaris badan, sekretaris kecamatan, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi untuk kecamatan yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung jawaban anggaran, evaluasi kinerja. a. Kepala dinas atau kepala badan sebagai pengguna anggaran dengan eselon II b b. Sekretaris dinas, sekretaris badan dan camat sebagai kuasa pengguna anggaran dengan

eselon III a c. Sekretaris kecamatan dan kepala bidang sebagai pejabat pembuat komitmen dengan eselon III b d. Kepala sub bagian dan kepala seksi dengan eselon IV b Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Pengisian kuesioner oleh seluruh pegawai yang bersangkutan seluruh OPD Kabupaten Nagekeo-Flores.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 HASIL

Penelitian ini menggunakan 50 orang responden dari satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang terdiri dari tim anggrang pemerintah daerah (TAPD) yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah Kabupaten Nagakeo. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pembagian kusioner kepada para responden. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan anggaran berbasis kinerja yang diukur dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan evaluasi kinerja berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu dalam hal ini pada Pemerintah Kabupaten Nagakeo.

#### a. Pengujian Hipotesis

##### 1. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda

##### Uji Regresi linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Standar Eror
(Constan)	10,745	3,340
Penerapan anggaran	,173	0,95
Pelaksanaan anggaran	,435	1,596
Pelaporan pertanggungjawaban	1,102	,386
Evaluasi kinerja	-,0024	1,556

Sumber:.....(....)

Dari tabel diatas dapat diperoleh rumus sebagai berikut:

$$Y = 10,745 + 0,173X_1 + 0,435X_2 + 1,102 X_3 - 0,024X_4$$

Pada persamaan regresi diatas, konstanta ( $\beta_0$ ) adalah sebesar 10,743 hal ini berarti jika tidak ada perubahan penerapan anggaran berbasis kinerja

yang terdiri dari variabel perencanaan anggaran (X1), Pelaksanaan anggaran (X2), Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X3), dan evaluasi kinerja (X4) yang mempengaruhi, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terjadi pada pemerintah kabupaten Nagekeo sebesar 10,745 sedangkan hasil uji regresi berganda untuk variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien perencanaan anggaran (X1) sebesar 0,173 berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian keuangan (Y). hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan perencanaan anggaran suatu satuan maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah naik sebesar 0,173 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.
2. Nilai koefisien pelaksanaan anggaran (X2) sebesar 0,435 berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pelaksanaan anggaran satu satuan maka variabel akuntabilitas instansi pemerintah naik sebesar 0,435, dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.
3. Nilai koefisien Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X3) sebesar 1,102 berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran satu satuan maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah naik sebesar 1,102 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.
4. Nilai koefisien evaluasi kinerja (X4) sebesar -0,024 berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan evaluasi kinerja satu satuan maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah naik sebesar -0,024 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

## 2. Pengujian Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara bersama-sama

### Hasil Pengujian Simultan (uji F)

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum o	Mean		
1	Regression	320,567	4	82,567	21,398 ,000 <sup>b</sup>
	Residual	169,743	44	3,861	
	Total	503,410	48		

a. Dependent Variable: akuntabilitas kinerja

- b. Predictors: (Constant), evaluasi kinerja, perencanaan anggaran pelaporan pertanggungjawaban , pelaksanaan anggaran  
Sumber: data primer, olahan (2024)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 21,398. Berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas  $<0,05$ , maka diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari indikator perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja secara serempak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikan  $F = 21,398 <0,05$ . Sehingga jika perencanaan anggaran, perencanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja secara bersama-sama meningkat, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga meningkat.

## 3. Uji Persial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menentukan apakah variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara persial.

### Hasil pengujian persial (UJI t)

MODEL	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients		Sig
	B	Beta			
(constant)	10,743			3,214	,002
PA	,171		,184	1,783	,083
PAA	,431		,188	,271	,787
PPA	1,106		,549	2,851	,006
EK	-,029		-,012	-,017	,983

Sumber: data primer, olahan 2024

Dari tabel diatas menunjukkan hasil uji T adalah :

- a. Perencana anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara persial hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi 0,083  $>0,05$  dan hipotesis ditolak.
- b. Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara persial. Hal ini dibuktikan tingkat signifikansi yang diperoleh 0,787  $>0,05$  dan hipotesis ditolak.
- c. Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara persial, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi 0,006  $<0,05$  dan hipotesis ditolak.

d. Evaluasi kinerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara persial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan yang diperoleh  $0,983 > 0,05$  dan hipotesis ditolak.

## 4.2 PEMBAHASAN

### 1. Hasil Uji Pengaruh Perencanaan Anggaran (X1) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Berdasarkan hasil uji persial yang telah dilakukan antara perencanaan anggaran sebagai (X1) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel (Y) menunjukkan bahwa bahwa t hitung sebesar 1,783 dengan nilai signifikan sebesar  $0,083 < 0,05$  dari hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,173 menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan tidak baik atau kurang baik, sehingga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan perencanaan yang baik. Karna, perencanaan merupakan pondasi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi atau instansi

### 2. Hasil uji pengaruh pelaksanaan anggaran (X2) terhadap akuntabilitas kinerja (Y)

Berdasarkan hasil uji persial yang telah dilakukan antara pelaksanaan anggaran sebagai (X2) Terhadap akuntabilitas kinerja instansi sebagai variabel (Y) menunjukkan bahwa t hitung sebesar 0,173 dengan nilai signifikan sebesar 0,083  $> 0,05$  dan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,435 menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika pelaksanaan anggaran yang dilakukan semakin baik dan benar, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akan tetapi tidak pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena kemungkinan variabel pelaksanaan anggaran dipengaruhi oleh variabel perencanaan anggaran.

### 3. Hasil Uji Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y).

Berdasarkan hasil uji persial yang telah dilakukan antara pelaporan/pertanggungjawaban anggaran kinerja sebagai (X3) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai (Y) menunjukkan bahwa t hitung sebesar 2,851 dengan nilai signifikan sebesar  $0,006 > 0,05$  dan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 1,106 menunjukkan bahwa variabel pelaporan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika pelaporan pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan semakin baik atau besar, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan efektifitas pengendalian keuangan perlu dilakukan pelaporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban anggaran.

### 4. Hasil Uji Pengaruh Evaluasi Kinerja (X4) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Berdasarkan hasil uji persial yang telah dilakukan antara evaluasi kinerja sebagai (X4) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai (Y) menunjukkan bahwa t hitung sebesar (-0,017) dengan nilai signifikan sebesar  $0,985 > 0,05$  dan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,029 menunjukkan bahwa variabel evaluasi kinerja anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika evaluasi kinerja yang dilakukan semakin baik atau besar, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akan tetapi pengaruhnya tidak berdampak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi karena kemungkinan variabel evaluasi kinerja dipengaruhi oleh variabel pelaporan pertanggungjawaban anggaran. Tujuan dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penlitian ini bahwa pengaruh penerapan anggaran yang terdiri dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan, dan evaluasi kinerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaripuddin, sutriana Basri (2014) dengan judul

Pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (studi pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Kediri). Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD kota Kendari dan evalusaikinerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja yang diprosksikan oleh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggung jawaban anggaran, dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Nagekeo), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian secara simultan (uji F), menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Nagakeo.
2. Berdasarkan uji regresi linear berganda, menunjukkan bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi. dan evaluasi kinerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### 5.2 Saran

1. Dalam membuat perencanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Nagekeo sebaiknya lebih mengutamakan membuat program atau kegiatan yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Nagekeo sebaiknya lebih memonitoring pelaksanaan program/kegiatan seberapa jauh pelaksanaanya dan memperbaiki system akuntansi keuangan daerah dalam hal pencatatan penggunaan anggaran.
3. Dalam hal pelaporan dan evaluasi kinerja perlu adanya monitoring dari pemerintah pusat agar anggaran yang diberikan untuk pemerintah daerah dapat sepenuhnya digunakan untuk

keperluan program/kegiatan yang telah disusun untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik dengan ditandai tercapainya visi misi organisasi melalui pengelolaan keuangan pemerintah yang baik.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel- variabel yang lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diantaranya : kejelasan sasaran anggaran, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan penerapan akuntansi keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP KPPN.
- Helina 2019. "Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar". Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 12. e- ISSN: 2116-412
- Nadila Cantika / 2022 / Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sumatera Utara)
- Prastianingrum , 2018 "Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Bogor)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2007) Jakarta: Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014) Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja.
- Wardani "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerj Ainstansi Pemerintah Pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung